



A. Junaedi Karso

TANAH NGANGGUR

DUA TAHUN DIAMBIL NEGARA

BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI VS
KONGLOMERAT PEMILIK LAHAN TERBESAR



TANAH NGANGGUR DUA TAHUN DIAMBIL NEGARA

BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI VS
KONGLOMERAT PEMILIK LAHAN TERBESAR



A Junaedi Karsahir lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi

Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *ElementaryOne* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *ElementaryTwo* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *IntermediteOne* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *IntermediteTwo* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advanced* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com

Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-634-248-424-3



9

786342

484241

**TANAH NGANGGUR DUA TAHUN
DIAMBIL NEGARA
BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
VS KONGLOMERAT PEMILIK
LAHAN TERBESAR**

A.Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**TANAH NGANGGUR DUA TAHUN DIAMBIL NEGARA
BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
VS KONGLOMERAT PEMILIK LAHAN TERBESAR**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Nur Arif Budiman

Tata Letak : Adesya Ramadhini

ISBN : 978-634-248-424-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
SEPTEMBER 2025
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar”

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutip atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar”.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutip, lansir dari berbagai sumber baik dari buku, artikel, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, *online*, *google website*, media khususnya kompasiana.com; kompaspedia.kompas.id; nasional.kompas.com; kolom.kompas.com; tempo.co; antaranews.com; news.detik.com; cnnindonesia.com; hukumonline.com; mkri.id; perludem.org; tirto.id; pshk.or.id; goodstats.id; Ums.Ac.Id; Rumaysho.Com; Muslim.Or.Id; Sebagian juga diambil dari buku, *Presidential Threshold* di Indonesia Antara Positif, Negatif & Solutif, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, 2024, yang ditulis oleh A.junaedi Karso, Serta Sumber Lainnya.

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “**Allah SWT**” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 TANAH MENGANGGUR DISITA NEGARA.....	1
A. Ramai Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara.....	1
B. Pemerintah Tetapkan 184 Bidang Tanah Nganggur, Bisa Diambil Negara	10
C. Negara Bakal Ambil Alih Tanah Nganggur 2 Tahun...	14
D. Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara	18
E. Dasar Hukum Tanah Nganggur Diambil oleh Negara.....	23
BAB 2 TANAH DI INDONESIA.....	26
A. Kepemilikan Tanah di Indonesia	26
B. Negara Memiliki Tanah.....	31
C. Reformasi Setengah Hati	36
D. Isu Krusial	42
E. RUU Cipta Kerja dan Pertanahan	45
F. Polemik Hak Guna Usaha	53
BAB 3 PENGUASAAN TANAH TERLANTAR OLEH NEGARA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI RI	60
A. Kedudukan Agraria Indonesia.....	60
B. Wacana Digulirkan Pengambilalihan Tanah Kosong oleh Negara.....	94
C. Pemerintah Siap Ambil Alih Tanah Terlantar	100
D. Jangka Waktu Status Tanah Terlantar di Indonesia ...	105
BAB 4 KONGLOMERAT PEMILIK TANAH TERLUAS DI DUNIA VERSUS PENGAMBILALIHAN LAHAN KOSONG OLEH NEGARA.....	117
A. Sorotan Tanah Kosong Diambil Negara	117
B. Konglomerat Pemilik Properti Tanah Terluas di Dunia.....	150
C. Konglomerat Penguasa Lahan di Ibu Kota Baru.....	160
D. Naik dan Mahalnya Properti di Indonesia.....	171
E. Penerima HGU di Indonesia.....	177

F. Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan.....	182
G. Perusahaan Tambang Terbesar Indonesia	186
DAFTAR PUSTAKA.....	190
TENTANG PENULIS	196

BAB

1

TANAH MENGANGGUR DISITA NEGARA

A. Ramai Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara

1. Hebohnya Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara

“Rekening nganggur 3 (tiga) bulan diblokir negara, tanah nganggur 2 (dua) tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun negara tidak peduli,” bunyi unggahan warganet yang viral di berbagai platform media sosial.

Istilah tanah nganggur dua tahun disita negara kembali ramai di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir¹. Istilah itu muncul bersandingan dengan rencana pemerintah melalui Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan membekukan rekening bank milik masyarakat yang menganggur.

Pengertian Tanah Terlantar

Kondisi tanah yang dapat dikategorikan sebagai kawasan telantar dan tanah telantar yang diatur di dalam PP 20/2021².

¹<https://www.kompas.com/properti/read/2025/07/31/17300032>
1/ Muhdany Yusuf Laksono, ramai-lagi-tanah-nganggur-2-tahun-disita-negara-begini-faktanya, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.05 WIB

² <https://www.hukumonline.com/> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.58 WIB

BAB

2

TANAH DI INDONESIA

A. Kepemilikan Tanah di Indonesia

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia memiliki luas daratannya mencapai 1.919.443 km², luas laut 3.257.357 km². Jumlah wilayah lautan dan daratan adalah 5.176.800 km².³⁴

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan tersebut berarti segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum akan berakibat pada akibat hukum baik itu hukum tertulis baik itu hukum tidak tertulis.

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional³⁵. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

³⁴<http://www.donisetiawan.com/luas-wilayah-indonesia/>.

Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018

³⁵ Karso A. Junaedi (2023), Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Desember 2023 Anggota Ikapi Jawa Tengah, h.1

BAB 3

PENGUASAAN TANAH TERLANTAR OLEH NEGARA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI RI

A. Kedudukan Agraria Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berhubungan langsung dengan pertanahan. Dan dalam hal mengenai syarat pengukuran/pemetaan yang diberikan oleh pamong desa dan petugas pengukuran/pemetaan hanyalah syarat yang berupa identitas saja dari pemilik tanah atau dengan kata lain dokumen kepemilikan tanah baik itu berupa Akta Jual Beli (AJB) atau Kikitr maupun Letter C, tidak menjadi syarat utama.

1. Hukum Agraria

Sejak proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 Pemerintahan Republik Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri Hukum Agraria Kolonial dan segera membentuk Hukum Agraria Nasional⁴⁷. Dalam hukum tanah nasional tersebut memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok yang disusun dalam bentuk undang-undang, dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan lainnya. Oleh karena Undang-Undang Pokok Agraria memiliki tujuan pokok yaitu:

⁴⁷ Karso A. Junaedi, (2022), Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul Di Patimban Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, h.1-4

BAB 4

KONGLOMERAT PEMILIK TANAH TERLUAS DI DUNIA VERSUS PENGAMBILALIHAN LAHAN KOSONG OLEH NEGARA

A. Sorotan Tanah Kosong Diambil Negara

1. Tanggapan Kementerian ATR/BPN

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Asnaedi membantah kabar mengenai tanah kosong yang belum bersertifikat akan diambil alih oleh negara usai pemerintah berencana tidak memberlakukan girik, *verponding*, dan letter c mulai 2026¹⁰².

Menurut Asnaedi dalam keterangannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025. "Jadi terkait dengan informasi terkait dengan tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara, itu tidak benar,". (Databoks.co.id, 19 Juli 2025).

Ketentuan Perampasan Tanah Kosong

Asnaedi mengungkapkan negara tidak melakukan perampasan kepada tanah yang masih menggunakan girik dan bekas hak lama lainnya.

¹⁰² <https://www.tempo.co/> Soal Sorotan 'Tanah Kosong' Diambil Negara. Bagaimana Tanggapan Kementerian ATR/BPN, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.35 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Dennys Andreas Sutoppo, 2016, *Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*, Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung
- <https://app.cnbcindonesia.com/> Arrijal Rachman, Ingat Warga RI! Tanah Terlantar Bisa Langsung Dikuasai Negara, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.18 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.02 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/profile/reza-pahlevi>, Holding BUMN Tambang MIND.ID Pimpin Perusahaan Tambang Terbesar Indonesia, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.05 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/profile/reza-pahlevi>, Ini Emiten Batu Bara dengan Produksi Terbesar di Indonesia, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.06 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/profile/reza-pahlevi>, Jokowi Beri Izin Tambang Paling Luas Dibandingkan dengan Presiden RI Lainnya, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.04 WIB
- <https://jatim.tribunnews.com/> Arie Noer Rachmawati, 1,4 Juta Hektar Lahan Terlantar, Negara Bisa Ambil Alih? Termasuk Tanah HGB HGU hingga Hak Pakai, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.48 WIB
- <https://jatimlines.id/> Schaldy, Pemerintah Siap Ambil Alih Tanah Terlantar, Menteri ATR: Tidak Boleh Ada Tanah Menganggur Bertahun-tahun, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.25 WIB
- <https://kalimkece.id/> Sapri Maulana, Siapa Penguasa Tanah Kaltim, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.21 WIB

- <https://money.kompas.com/read/2025/07/30/184504626/> Muhammad Idris, tanah-nganggur-2-tahun-disita-negara-ini-faktanya, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.40 WIB ¹<https://www.cnnindonesia.com/> Pemerintah Tetapkan 184 Bidang Tanah Nganggur, Bisa Diambil Negara, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.45 WIB
- <https://news.detik.com/infografis/d-3930318/> Erwin Dariyanto, siapa-paling-banyak-kuasai-lahan-indonesia, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.10 WIB¹ <https://databoks.katadata.co.id/> Bagaimana Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Indonesia, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.38 WIB
- <https://populi.id/> Rahadian Bagus, Siap-siap, Tanah Bersertifikat Nganggur Dua Tahun Akan Diambil Alih Negara, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.28 WIB
- <https://radarsolo.jawapos.com/Syahaamah> Fikria, Ini Tanda-tanda Tanah Nganggur yang Akan Diambil Negara Jika Ditelantarkan 2 Tahun, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB
- <https://rmol.id/> Widian Vebriyanto, Total HGU Tembus 10 Juta Hektare, Siapa Saja Penerimaanya, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.27 WIB
- <https://tirto.id/Rizal> Amril Yahya, Benarkah Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara? Ini Penjelasannya, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.48 WIB
- <https://wartaekonomi.co.id/Clara> Aprilia Sukandar, Tiga Konglomerat Ini Dikabarkan Jadi Penguasa Lahan di Ibu Kota Baru, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.17 WIB
- <https://www.bloombergtechnoz.com/> Merinda Faradianti, Penarikan Lahan Nganggur Oleh Negara Tak Bisa Dilakukan Paksa, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.46 WIB

[https://www.cnbcindonesia.com/M_Fakhriansyah, Kisah Orang Terkaya RI, Jadi Penguasa Seperempat Tanah Singapura](https://www.cnbcindonesia.com/M_Fakhriansyah,Kisah_Orang_Terkaya_RI,_Jadi_Penguasa_Seperempat_Tanah_Singapura), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.23 WIB

[https://www.cnbcindonesia.com/Tasya Natalia, Cek! Ini Dia Emiten Properti yang Punya Lahan Paling Luas](https://www.cnbcindonesia.com/Tasya_Natalia,Cek!_Ini_Dia_Emiten_Properti_yang_Punya_Lahan_Paling_Luas), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.29 WIB

[https://www.cnnindonesia.com/3,3 Juta Ha Tanah Kalimantan Dikuasai 25 Konglomerat Sawit](https://www.cnnindonesia.com/3,3_Juta_Ha_Tanah_Kalimantan_Dikuasai_25_Konglomerat_Sawit), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.16 WIB

[https://www.cnnindonesia.com/Negara Bakal Ambil Alih Tanah 'Nganggur' 2 Tahun, Bagaimana Prosesnya](https://www.cnnindonesia.com/Negara_Bakal_Ambil_Alih_Tanah_'Nganggur'_2_Tahun,_Bagaimana_Prosesnya), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.50 WIB

[https://www.cnnindonesia.com/Tanah Nganggur Bakal Diambil Negara, Benar atau Tidak](https://www.cnnindonesia.com/Tanah_Nganggur_Bakal_Diambil_Negara,_Benar_atau_Tidak), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.11 WIB

[https://www.detik.com/bali Ilham Fikriansyah, Pemerintah Amankan 1,4 Juta Ha Tanah Telantar, Siap Dibagi ke Ormas-Ormek](https://www.detik.com/bali_Ilham_Fikriansyah,_Pemerintah_Amankan_1,4_Juta_Ha_Tanah_Telantar,_Siap_Dibagi_ke_Ormas-Ormek), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.43 WIB

[https://www.detik.com/properti, Sekar Aqillah Indraswari, BPKN Kritik Wacana Tanah Terlantar Diambil Negara: Melanggar Hak Warga Negara](https://www.detik.com/properti,_Sekar_Aqillah_Indraswari,BPKN_Kritik_Wacana_Tanah_Terlantar_Diambil_Negara:_Melanggar_Hak_Warga_Negara), diakses pada tanggal 7 Agustus 2025, pukul 04.35 WIB

[https://www.hukumonline.com/ Muhammad Yasin, Status Tanah Terlantar dan Putusan-Putusan Pengadilan yang Relevan](https://www.hukumonline.com/Muhammad_Yasin,_Status_Tanah_Terlantar_dan_Putusan-Putusan_Pengadilan_yang_Relevan), diakses pada tanggal 7 Agustus 2025, pukul 04.45 WIB

[https://www.hukumonline.com/ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara](https://www.hukumonline.com/Nafiatul_Munawaroh,S.H.,_M.H,_Apakah_Tanah_Terlantar_Menjadi_Milik_Negara), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.58 WIB

[https://www.idxchannel.com/ Binti Mufarida, Soal Tanah Nganggur 2 Tahun Diambil Alih Negara, Istana: Untuk Cegah Konflik Agraria](https://www.idxchannel.com/Binti_Mufarida,_Soal_Tanah_Nganggur_2_Tahun_Diambil_Alih_Negara,_Istana:_Untuk_Cegah_Konflik_Agraria), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.31 WIB

<https://www.inilah.com/> Diana Rizky, Jangan Sasar Rakyat, kalau Berani Pemerintah 'Sikat' Ratusan Ribu Ha Lahan Nganggur Perusahaan, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.20 WIB

<https://www.inilah.com/> Diana Rizky, Tolak Wacana Pengambilalihan Tanah Nganggur, PDIP Sebut Kebijakan Ngawur, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.54 WIB

<https://www.inilah.com/> Indira Lintang, Daftar 10 Pemilik Properti Tanah Terluas di Dunia, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.12 WIB

<https://www.kompas.com/properti/read/2025/07/31/173000321/> Muhdany Yusuf Laksono , ramai-lagi-tanah-nganggur-2-tahun-disita-negara-begini-faktanya, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.05 WIB

<https://www.kompas.id/> BM Lukita Grahadyarini, Jelang Akhir Tahun, Pasar Properti Akan Terkontraksi Ringan, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 11.51 WIB

<https://www.kompas.id/> Hanif Nurcholis, Apakah Negara Memiliki Tanah, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 12.16 WIB

<https://www.kompas.id/> Maria SW Sumardjono, Kompleksitas Tanah Negara, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.36 WIB

<https://www.kompas.id/> Maria SW Sumardjono, Mendesakkan HGU 90 Tahun, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.33 WIB

<https://www.kompas.id/> Maria SW Sumardjono, RUU Cipta Kerja dan Pertanahan, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 09.30 WIB

<https://www.kompas.id/> Ward Berenschot, 150 Tahun Belenggu atas Hak Tanah, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 12.19 WIB

[https://www.kompas.tv/Rizky L Pratama, Penjelasan Kementerian ATR/BPN soal Lahan Menganggur Dua Tahun Bisa Diambil Negara](https://www.kompas.tv/Rizky%20L%20Pratama,%20Penjelasan%20Kementerian%20ATR/BPN%20soal%20Lahan%20Menganggur%20Dua%20Tahun%20Bisa%20Diambil%20Negara), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.16 WIB

[https://www.liputan6.com/Bantah Isu Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara](https://www.liputan6.com/Bantah%20Isu%20Tanah%20Nganggur%20Dua%20Tahun%20Diambil%20Negara), Dirjen ATR/BPN: Penertiban Fokus pada HGU dan HGB, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.41 WIB

[https://www.liputan6.com/Devira Prastiwi, Menteri Nusron: Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara](https://www.liputan6.com/Devira%20Prastiwi,%20Menteri%20Nusron:%20Tanah%20Nganggur%202%20Tahun%20Disita%20Negara), Dikasih ke Bank Tanah, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.22 WIB

[https://www.tempo.co/Apakah Tanah Tak Bersertifikat akan Diambil Negara](https://www.tempo.co/Apakah%20Tanah%20Tak%20Bersertifikat%20akan%20Diambil%20Negara) pada 2026, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.36 WIB

[https://www.tempo.co/Peliknya Sengketa Tanah: Siapa Bertanggung Jawab Jika Pengadilan Salah Gusur](https://www.tempo.co/Peliknya%20Sengketa%20Tanah:%20Siapa%20Bertanggung%20Jawab%20Jika%20Pengadilan%20Salah%20Gusur), diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.39 WIB

[https://www.tempo.co/ Soal Sorotan 'Tanah Kosong' Diambil Negara](https://www.tempo.co/Soal%20Sorotan%20'Tanah%20Kosong'%20Diambil%20Negara). Bagaimana Tanggapan Kementerian ATR/BPN, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.35 WIB

Ida Irawati Ismy, S.H., 2005, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) Untuk Tanah Warisan Di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Semarang*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hal. 2

Karso A. Junaedi (2023), *Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan Hukum Adat Dalam Undang-Undangan Dasar 1945*, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Desember 2023 Anggota Ikapi Jawa Tengah

M.P Siahn, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju

Ringkasan AI, Kepemilikan tanah di Indonesia, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 12.15 WIB

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso, lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (*Understanding and Implementing ISO 9001:2015*) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di

BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun

2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppel Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang, Team Hukum PTPN IV (Palmco).

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email [Bintang.lyatiara66@gmail.com/](mailto:Bintang.lyatiara66@gmail.com) junaedi@unismuh.ac.id, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.